

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

KRISTOPHER BOSCO CERY¹

NIM:E1011161018

Rusdiono¹ Abdul Rahim²

Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

*Email:e1011161018@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari OJones (2006:89) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Keempat indikator implementasi tersebut terdiri dari: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah Sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS sudah sangat memadai seperti alat scrining, obat-obatan, alat medis habis pakai, serta alat kerja lengkap sebagai penunjang kerja dalam Kesekretariatan.; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah Komisi Penanggulangan AIDS tidak terlalu mempublis kegiatan mereka dalam sosialisasi karna terdapat stigma negatif oleh pemuka agama dan BNN; 3) Aplikasi, kesimpulannya pengaplikasiannya masih saja terdapat hambatan seperti stigma yang buruk terhadap pengidap HIV/AIDS; 4) Implikasi, kesimpulannya adalah pentingnya sosialisasi tentang pemahaman khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi penelitian ini dari segi interpretasi adalah Komisi Penanggulangan AIDS melalukan izin dan kompromi terlebih dahulu dengan pemuka agama diwilayah tempat melakukan sosialisasi. Selain itu saran-saran lainnya berupa secara manual apabila para peserta tidak memiliki atm untuk menerima uang tranfortasi dan juga Dinas Kesehatan dan KPA berkoordinasi dan berunding bersama BNN dan Pemuka agama dalam pelaksanaan program pemberian jarum suntik steril bagi pengguna nafza suntik dan kondom untuk pekerja seks komersil, dan memberikan penjelasan terkait fungsi dan tujuan program tersebut sehingga dapat saling memaklumi dan memahami tujuan masing-masing.

Kata Kunci : Implementasi, Pencegahan, Penanggulangan, HIV/AIDS

THE IMPLEMENTATION OF PONTIANAK CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2012 ON THE PREVENTION AND HIV/AIDS CONTROL IN PONTIANAK CITY

By:

KRISTOPHER BOSCO CERY¹

ID : E1011161018

H. Rusdiono, M.Si¹, Abdul Rahim, M.Si²

Public Administration Study Program, Social and Political Science Faculty, Universitas
Tanjungpura

*Email: e1011161018@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura.
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura

ABSTRACT

This study aimed to provide understanding regarding the implementation of Regional Regulation by the Pontianak City Government in their attempt to prevent and control HIV/AIDS in Pontianak City. This study used O. Jones' policy implementation theory (2006: 89) which consisted of four main activities such as Organization, Interpretation, Application, and Implication. The results showed that the facilities and infrastructures in in the Implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2012 on The Prevention and HIV/AIDS Control was already very adequate, such as the screening tool, medicines, consumable medical devices, and complete work tools to support the work in the Secretariat. However, The AIDS Prevention Commission did not really publish their activities in socialization because there was negative stigma by the religious leaders and the National Narcotics Board. The results also showed that there were still obstacles in its application such as bad stigma against people living with HIV/AIDS. Socialization for understanding the issue is important especially in preventing and controlling HIV/AIDS in Pontianak City. The researcher suggests The AIDS Prevention Commission should ask permission and compromise first with the religious leaders in the area where the socialization will be carried out. Moreover, the transportation should be provided manually if the audience do not have ATM Card to receive the money, the Health Department and the AIDS Prevention Commission should coordinate and discuss with the National Narcotics Board and the religious leaders during the execution program of administering sterile needles for injecting drug users and condoms for commercial sex workers, and lastly the AIDS Prevention Commission should provide an explanation regarding the functions and objectives of the program so that they can understand each other and understand each other's goals.

Keywords: implementation, Prevention, Control, HIV/AIDS\



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah suatu kumpulan gejala penyakit kerusakan sistem kekebalan tubuh; bukan penyakit bawaan tetapi didapat dari hasil penularan. Penyakit ini disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) (Wodoyono,2005;83).

Penyakit HIV ditularkan melalui berbagai cara, antara lain melalui cairan tubuh seperti darah, cairan genitalia, dan ASI. Selain melalui cairan tubuh, HIV juga ditularkan melalui jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah, hubungan seksual, dan penularan ibu hamil positif HIV kepada janinnya.

Dikota Pontianak sendiri menurut Yahya (Asbid Warga peduli AIDS bagian monitoring-evaluasi) pada tahun 2012 terjadi pelonjakan HIV dikota Pontianak yang disebabkan oleh pemakaian narkotika yang menggunakan jarum suntik yang tidak steril dan berganti-gantian, sehingga dirancang lah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak. Peraturan

Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 dalam kegiatan pencegahan dibagi dalam tiga bagian kegiatan yang terdapat dalam pasal 4 yang berisikan bagian promosi/penyuluhan, pasal 5 dan 6 yang berisikan bagian pencegahan dan pada pasal 7 yang berisikan konseling dan tes HIV.

Sumber daya yang tidak terpenuhi baik sumber daya berupa materi maupun sdm, maka akan membuat terjadinya hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS. Sumber dana yang tidak memadai akan menghambat Bergeraknya suatu organisasi dalam melakukan tugasnya. Anggaran Dana yang menjadi RKA yang diproposalkan oleh KPA berjumlah Rp 504.074.268. Namun karna keterbatasan anggaran, perhitungan dan penyelidikan lebih lanjut oleh bagian keuangan Dinas Kesehatan Kota Dana Anggaran yang di dapat berjumlah Rp 410.164.634.

Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak sudah melakukan sosialisasi kepada kelompok orang-orang dengan resiko penularan HIV, namun

dalam memberikan sosialisasi ada salah satu kelompok dengan resiko yang tidak dapat dijangkau oleh KPA yaitu kelompok LSL sehingga pada tahun 2019 kelompok kategori laki suka laki (LSL) menduduki urutan kedua sebagai penyumbang penularan HIV berdasarkan kategori/kelompok resiko. Sosialisasi untuk kaum LSL susah untuk dilakukan karna mereka cenderung tertutup dan tidak transparan berbeda dengan kaum waria yang sangat mudah untuk dikenali sehingga dalam memberikan sosialisasi dan program pemberian kondom gratis kepada kaum waria sangat mudah dibandingkan dengan kaum LSL.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Materi dalam menunjang kegiatan program yang ada.
2. Penerapan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS berupa kondom gratis dan jarum suntik steril yang mendapat tentangan dari BNN dan pemuka agama.
3. Susahnya menjangkau kelompok laki suka laki (LSL) dalam memberikan penyuluhan dan kondom gratis.

3. Fokus Penelitian

Melihat adanya permasalahan yang terjadi dan akan diteliti, yaitu semakin bertumbuhnya wabah AIDS. Maka penelitian ini memfokuskan Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di kota Pontianak.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di kota Pontianak.

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di kota Pontianak

6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap khasanah keilmuan, khusus

bagi yang mengambil fokus penelitian pada kebijakan publik terkait mengenai suatu kebijakan yang telah digunakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat dari penerapan teori dalam dunia nyata, baik bagi peneliti sendiri maupun lembaga ditempat penelitian. Adapun manfaat praktis yang dimaksud antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi Aparatur Pemerintah Kota yaitu mensosialisasikan pentingnya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Jika tidak dilakukannya pencegahan dikhawatirkan dapat membuat pelonjakan kasus infeksi HIV di Kota Pontianak dimana sampai saat ini tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit HIV.
2. Penelitian ini juga diharapkan supaya masyarakat mampu memberikan perhatian yang lebih terhadap edukasi seks yang aman agar terhindar dari virus HIV, selain itu diharapkan juga orang-orang dengan kelompok rawan HIV pun tereduksi tentang pentingnya pencegahan penularan virus HIV.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik ialah terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*public policy*” yang di terjemahkan menjadi kebijakan publik. Ada juga yang menerjemahkan sebagai kebijakan negara atau kebijakan pemerintah (Islamy 1988:2). Menurut Dye (Pasolong:2008:39) mengatakan kebijakan publik adalah “Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua aksi pemerintah, jadi bukan sekadar merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Friedrich (Dwijowijoto:2003:4) mendefinisikan kebijakan sebagai “Serangkaian gerakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu wilayah tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut diarahkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan tertentu”. Sedangkan untuk pendapat Dewey (dalam Parson, 2005:10) kebijakan publik menitikberatkan pada “Publik dan problem-problemnya”. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan

persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik terdapat dua pilihan yang dapat diambil yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau bentuk formulasi kebijakan derivat. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah ialah jenis kebijakan publik penjabar. Sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung dilaksanakan adalah Keputusan Presiden, Imbauan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain. Inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimanakebijakan yang dibuat disesuaikan sumberdaya yang tersedia. Agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan dapat diimplementasi dengan benar serta agar masyarakat bisa mengetahui isi dari kebijakan tersebut harus dilakukan sosialisasi supaya peraturan yang dibuat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sebatier(1997) sebagaimana dikutip (dalam Wahab 2008:65), mengatakan bahwa “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Widodo (2008:88) yang mengatakan implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta.

Menurut Abidin (2002:88) implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan karna tanpa pelaksanaan,suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan yang sejalan juga ditegaskan oleh Udoji (2006:140) yang mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting

bahkan mungkin jauh lebih penting pembuatan kebijakan, karna kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

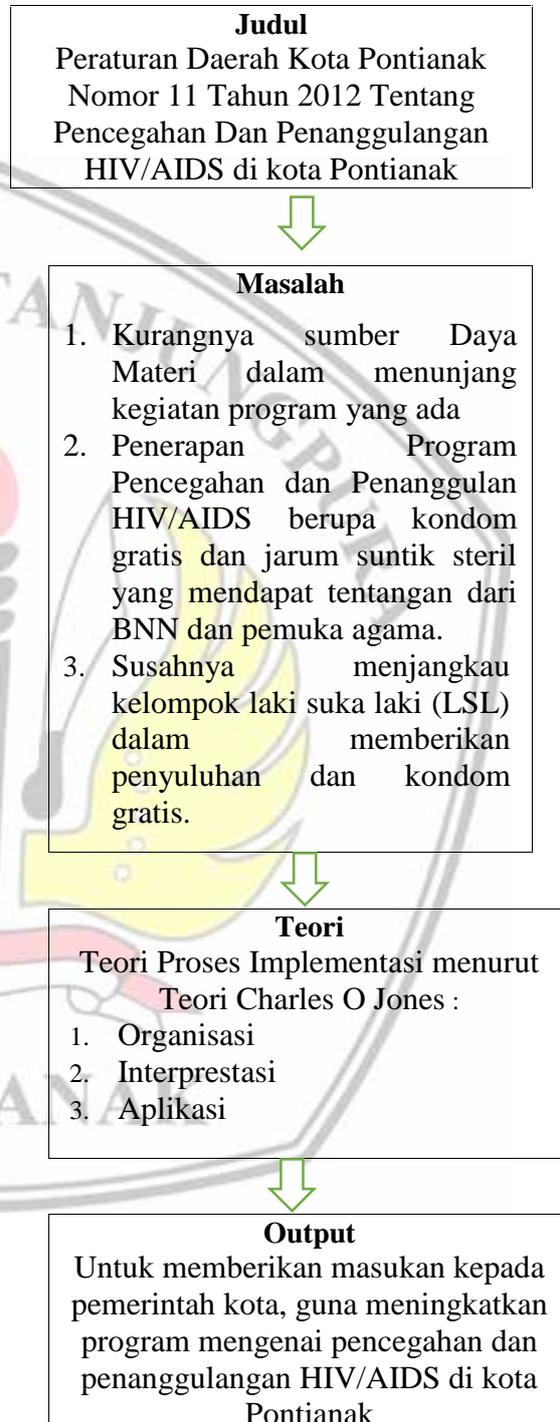
Menurut Darwin (dalam Widodo, 2006:88), persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat lima hal penting yaitu:

1. Pendayagunaan sumber
2. Pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi
3. Interpretasi
4. Manajemen program dan;
5. Penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Kamus Webster (dalam Wahab,1991:50), implementasi di artikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu O Jones (dalam Widodo,2006:89) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Berikut ini akan dijabarkan lebih operasional mengenai proses implementasi suatu kebijakan publik yang mencakup tahap pengorganisasian (*to*

Organized), interpretasi (*interpretation*), dan tahap aplikasi (*application*)

Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak.

Langkah-langkah Penelitian Membuat langkah-langkah penelitian merupakan hal yang penting agar proses

penelitian lebih fokus dan terarah serta penelitian dapat dilakukan dengan sistematis. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut:

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Penelitian Pendahuluan

Peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan informasi sementara yang berkaitan dengan peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di kota Pontianak.

2. Pengajuan Proposal Penelitian

Peneliti mengajukan rancangan penelitian kepada ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak.

3. Membuat Usulan Penelitian

Peneliti membuat usulan penelitian yang sesuai dengan outline yang telah disetujui, usulan penelitian dibuat terdiri dari 3 (tiga) bab yang diajukan kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing Pertama dan pembimbing kedua.

4. Seminar Usulan Penelitian

Peneliti melakukan konsultasi dan perbaikan outline dengan Dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua, kemudian mempersentasikan dalam seminar usulan penelitian.

5. Pelaksanaan Penelitian

Peneliti mengumpulkan data-data lapangan dengan melakukan observasi, wawancara kepada subjek penelitian ditempat peneliti.

6. Membuat Laporan Penelitian Skripsi

Peneliti membuat laporan penelitian dari hasil penelitian mengumpulkan data-data lapangan yang selanjutnya akan diuji pada saat sidang skripsi.

Lokasi penelitian di Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak khususnya Dikantor Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Jl. D.A. Hadi No.7, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. menurut Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara,

dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif artinya melalui penginderaan, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati.
2. Wawancara Menurut Esterberg (dalam Sugiyono,2007:211), mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2007:213). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Organisasi Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan atau implementor dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak sudah jelas dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak Komisi Penanggulangan Aids Kota Pontianak bermitra dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kota Pontianak serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Komunitas peduli Aids. Komisi Penanggulangan Aids Kota Pontianak sebagai yang

mengkoordinir jalannya program-program yang ada yang dijalankan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas Peduli Aids. Sehingga bisa membantu proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak menjadi lebih efektif.

Dalam menjalankan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Dinas Ketenagakerjaan menjalin kerjasama bersama KPA, Jadi apabila dalam suatu tempat kerja memperkerjakan 10 karyawan maka Dinas Ketenagakerjaan akan menghubungi KPA untuk memberikan sosialisasi pada tempat kerja tersebut akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan HIV,serta mencegah terjadinya diskriminasi apabila terdapat ODHA dalam suatu lingkungan kerja, hal ini merupakan suatu dukungan Dinas Ketenagakerjaan dalam mensukseskan pencegahan dan penanggulangan virus HIV.

2. Interpretasi implementor Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS sudah

paham bagaimana mereka harus bersikap dan apa yang harus mereka lakukan saat menghadapi berbagai masalah yang ada.

3. Aplikasi agar tidak menyebarnya virus HIV melalui hubungan seksual yaitu dengan memberikan alat pencegahannya berupa kondom gratis yang diberikan kepada populasi kunci seperti PSK, waria, dan memfasilitasi jarum suntik steril pada pengguna nafza suntik untuk menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Hal ini sesuatu yang wajar mengingat di Kota Pontianak sendiri seks bebas dan narkotika suntik yang menjadi jalur penyebaran utama virus HIV.
4. KPA juga memberikan sosialisasi kepada populasi kunci serta mendatangi mereka ditempat-tempat kerja mereka sembari memberikan sosialisasi KPA memberikan kondom gratis, selain itu untuk orang dengan HIV/AIDS (ODHA) positif juga ada pengobatannya agar virus HIV di dalam tubuh orang yang positif HIV tidak menjadi AIDS, karna apabila sudah menjadi AIDS sistim imun sudah sangat lemah sehingga semua penyakit dapat masuk didalam tubuh, maka orang dengan positif HIV didarakan melakukan pengobatan dan terapi obat

ARV agar menekan virus HIV didalam tubuh pengidap HIV, selain itu mereka dapat melakukan konseling secara gratis di 3 Rumah Sakit besar di Kota Pontianak, serta di setiap Puskesmas di Kota Pontianak. Pengobatan dan konseling ini diberikan secara gratis bagi pengidap ODHA.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil dari pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah dikemukakan peneliti, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui Kesekretariatan Komisi Penanggulangan AIDS, namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kesekretaratan Komisi Penanggulangan AIDS sehingga Implementasi belum optimal dan target

yang diharapkan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak ini belum tercapai.

Melihat dari permasalahan yang mempengaruhi belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak ini penulis menggunakan teori O'Jones yang berkaitan dengan Organisasi, Interpretasi, Aplikasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Organisasi

Organisasi dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak yang menjadi pelaksana kebijakan yang diberlakukan adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan pelaksana aktivitasnya adalah Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS yang diketuai langsung oleh Walikota Kota Pontianak, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam melaksanakan tugasnya bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pontianak serta Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan juga Komunitas Remaja Peduli AIDS . Untuk SOP nya baik dari Dinas Kesehatan, Sekretariat KPA dan juga UPT kesehatan dikota pontianak sudah melaksanakan Peraturan Daerah ini sesuai SOP masing-masing, seperti SOP pelayanan kesehatan untuk pengidap HIV/AIDS , SOP penyelenggaraan aktivitas kegiatan di lapangan oleh KPA.

Sumber dana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS berasal dari APBD dan APBN, namun menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dinas Kesehatan Kota Pontianak belum bisa memenuhi sepenuhnya kebutuhan untuk program HIV/AIDS. Sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS sudah sangat memadai seperti alat scrining, obat-obatan, alat medis habis pakai, serta alat kerja lengkap sebagai penunjang kerja dalam Kesekretariatan.

b. Interpretasi

Interpretasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak telah terinterpretasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pemahaman Dinas serta Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) selaku implementor peraturan daerah mengenai isi dan tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS juga telah terpenuhi. Hanya saja dalam sosialisasi Komisi Penanggulangan AIDS tidak terlalu mempublis kegiatan mereka dalam sosialisasi karena terdapat stigma negatif oleh pemuka agama dan BNN selain itu juga KPA belum bisa menjangkau kaum LSL lebih dalam untuk memberikan sosialisasi dan memberikan program-program kerja sehingga kurang efektif untuk menjangkau orang-orang yang diluar yang tidak mendapat informasi sosialisasi tersebut.

c. Aplikasi

Penerapan dalam peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dari

Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS sudah menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada, hanya saja dalam pengaplikasiannya masih saja terdapat hambatan seperti stigma yang buruk terhadap pengidap HIV/AIDS, pandangan negatif terhadap program pemberian kondom gratis untuk pekerja seks komersial dan orang dengan resiko HIV/AIDS, dan juga pandangan yang negatif tentang pemberian jarum suntik steril pada pengguna napsa suntik dan tidak adanya atm untuk menstransfer uang transportasi untuk peserta sosialisasi.

2. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS ini adalah sebagai berikut :

1. Organisasi

Semestinya dalam menutupi kurangnya sumber dana untuk melaksanakan program

penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat menutupi kekurangan tersebut dengan mencari donatur dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, sehingga apabila terjadi kekurangan dana, Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Kesekretariatan Komisi Penanggulangan AIDS dapat menggunakan uang pemberian dari donatur baik dari donatur luar negeri maupun donatur yang bersal dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pontianak.

2. Interpretasi

Sebaiknya dalam melakukan sosialisasi Tentang program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Komisi Penanggulangan AIDS melakukan izin dan kompromi terlebih dahulu dengan pemuka agama di wilayah tempat melakukan sosialisasi, sehingga pemuka agama setempat tidak menganggap janggal atas program-program yang akan diadakan setelah diberikanya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS selain itu juga KPA sebaiknya menggali lebih dalam keberadaan LSL dan melakukan pendekatan dengan

mereka dan komunitas mereka sehingga dapat dengan mudah memberikan sosialisasi dan program yang ada.

3. Aplikasi

Sebaiknya dalam memberikan uang transportasi dilakukan secara manual apabila para peserta tidak memiliki atm untuk menerima uang transportasi dan juga Dinas Kesehatan dan KPA berkoordinasi dan berunding bersama BNN dan Pemuka agama dalam pelaksanaan program pemberian jarum suntik steril bagi pengguna nafza suntik dan kondom untuk pekerja seks komersil, dan memberikan penjelasan terkait fungsi dan tujuan program tersebut sehingga dapat saling memaklumi dan memahami tujuan masing-masing.

F. REFRENSI

- Abidin, Said Zainal.2012.*Kebijakan Publik*. Jakarta:Salemba Humanika.
- Agustino, Leo.2017.*Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*.Bandung: IKAPI.
- Ahmad, Jamaludin.2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Alie Faried, Andi Syamsu Alam dan Sastro M. Wantu.*Studi*

- Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah.* Bandung: PT Refika Aditama.
- Dyah Ratih Sulistyastuti, Irwan Agus Purwanto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Yogyakarta: Gava Media.
- Endang, Soetari. 2014. *Kebijakan Publik (Pengantar).* Bandung: Pustaka Setia.
- Indiahono Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi Ke-2 Revisi.* Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Alfabeta.
- Tacan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI Bandung.
- Widodo Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Public: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Jakarta: Media Perindo.
- Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru.* Yogyakarta: Caps.
- Skripsi:**
Zainul Ihsan. 2019. Implementasi Permenkes No 21 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanggulangan HIV/AIDS Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.
<http://repository.uin-suska.ac.id/23239/>.
- Dokumen:**
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pontianak.
- Internet:**
Fajar. (2019). Kasus HIV/AIDS di Provinsi ini Naik 600 persen. Diakses pada 5 Juni 2019, dari <https://fajar.co.id/2019/07/05/kasus-hiv-aids-di-provinsi-ini-naik-600-persen/>